

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaborasi. Edisi Kedua.*: Gajah Mada University Press.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Ratminto dan Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Burhan, Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.

<http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/kepmenpan-rb/file/216-kepmenpan-2003-no-063>. (diakses pada tanggal 29 januari 2016)

Dari produk hukum :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Asasi Manusia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (HAM)

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ponorogo.

